

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-undang no 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dinyatakan bahwa :

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberhasilan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat dan peningkatan kewaspadaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi sosial dan politik.

Lembaga atau organisasi masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat pada umumnya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM umumnya memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat dalam arti memberdayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersama. Arti dari kebutuhan tersebut bisa kebutuhan pendidikan, tempat tinggal yang layak, lingkungan yang alami, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu didasari oleh perekonomian yang memadai, sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan dapat terpenuhi. Tetapi pada kenyataannya masih banyak perekonomian masyarakat yang belum memadai/memenuhi, oleh karena itu masyarakat Indonesia masih jauh dengan kata sejahtera.

Terbentuknya lembaga atau organisasi masyarakat berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia yang perekonomiannya mayoritas menengah ke bawah. Adanya lembaga swadaya masyarakat sedikitnya telah membantu program pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat, walaupun pada kenyataannya kata tersebut belum secara signifikan dapat diukur atau dibuktikan. Mensejahterakan masyarakat dalam arti pemberdayaan menjadi indikator keberhasilan pada program-program yang dirancang dan diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Indikator pemberdayaan menurut Suharto (2008, hlm 63) paling tidak memiliki empat hal, yaitu : merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi

kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapaitas.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Menurut Anwas ( 2013, hlm 48 ) Ketidakberdayaan atau kelemahan dalam aspek : pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dll. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Djohani (dalam Anwas, 2013, hlm 49) mengemukakan bahwa “pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan”. Rappaport (dalam Anwas, 2013, hlm 49) Pemberdayaan merupakan suatu cara dengan rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat, menghidupkan kembali tatanan nilai,budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat memang lebih sulit dibandingkan dengan memberikan bantuan yang bersifat *charity*. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang, pemerintah Indonesia terkadang dalam upaya pembangunan masyarakat tidak melakukan proses pemberdayaan, salah satunya seringkali pemerintah memberikan bantuan yang bersifat *charity*, membagikan uang kepada kaum dhuafa dalam bentuk program Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan hasilnya pun tidak dapat membuat masyarakat mandiri dan berdaya. Berdaya dalam hal ini dapat dilihat dan diukur dengan pengetahuan, keterampilan, usaha masyarakat yang tidak dimiliki, sehingga aspek tersebut membuat masyarakat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Hal tersebut menjadikan mayoritas penduduk Indonesia belum sejahtera/berdaya atau dapat dikatakan masih banyak penduduk miskin.

**Rini Novianti Yusuf, 2015**

**PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Menurut Martin dan Schuman (dalam Anwas, 2013, hlm 83), kemiskinan ditingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 20% sisanya hanya menguasai kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia dan sebagian besar penduduk dunia (80%) dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin. Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan, karena penduduk miskin di Indonesia kini tidak hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi wilayah perkotaan pun terjadi dan masih banyak penduduk miskin.

Kemiskinan menjadi masalah utama dalam hal pembangunan masyarakat, masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perkotaan. Kemiskinan perkotaan kini menjadi isu yang relevan dan mendesak untuk ditangani seiring dengan adanya pembangunan perkotaan. Salah satu ciri umum dari kondisi masyarakat yang miskin, tidak memiliki sarana dan prasarana dasar perumahan dan pemukiman yang memadai, kualitas lingkungan yang kumuh, tidak layak huni. Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Sehingga secara umum masyarakat miskin sebagai suatu kondisi masyarakat yang berbeda dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut Badan Pusat Statistik ( BPS ) dalam [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dipaparkan selama periode Maret 2014-September 2014, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan tercatat mengalami kenaikan. Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 8,47%, naik menjadi 8,52% pada September 2014. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan penurunan 11,42% pada Maret 2014 menjadi 11,35% pada September 2014. Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah penduduk miskin di Jawa Barat (Jabar) bertambah sejak bulan Maret hingga September 2014 lalu.

**Rini Novianti Yusuf, 2015**

*PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada bulan Maret 2014 jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat sebanyak 4,297 juta jiwa. Jumlah tersebut bertambah 85.610 orang menjadi 4,382 juta jiwa pada bulan September 2013. Berdasarkan catatan BPS tahun 2014, jumlah total penduduk Jabar mencapai 44,5 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2014 lalu mencapai 9,61% dari total jumlah penduduk. Garis kemiskinan Jawa Barat untuk daerah perkotaan bulan Maret 2014 sebesar Rp.288.742,- per bulan atau naik 2,69% dari kondisi September 2013 Rp.281.189,-.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pembangunan dan perkembangan suatu kota yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya, budaya, struktur dan dinamika, serta tingkat sosial ekonomi juga luas wilayahnya. Jumlah penduduk yang banyak memerlukan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, sehingga semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula kebutuhan sarana dan prasarana di kota tersebut. Tingkat sosial ekonomi dapat membentuk karakter dan kualitas kehidupan penduduk. Kota dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung dapat menimbulkan kekumuhan, sebaliknya jika kota dengan tingkat ekonomi yang baik cenderung akan lebih teratur. Pada luas wilayah, akan berkaitan dengan tingkat mobilitas dan interaksi antar penduduk. Ketiga hal tersebut di atas merupakan faktor penting dalam penentuan strategi pembangunan suatu kota.

Kondisi kota-kota yang berkembang di Indonesia, terkadang menjadi pusat-pusat perpindahan penduduk daerah/desa untuk datang dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, selain itu perpindahan penduduk daerah/desa dengan tujuan agar ada perubahan ekonomi atau perubahan hidup mereka. Sedangkan kota-kota yang menjadi sasaran belum siap menerima kedatangan penduduk daerah/desa dengan mengakomodasi perkembangan kegiatan perkotaan dalam sistem rencana tata ruang kota dengan berbagai aspek dan implementasinya, seperti kesiapan untuk menerima, mengatur, dan memberdayakan pendatang. Akibatnya terjadi aktivitas-aktivitas diluar rencana tata ruang kota, sehingga munculnya pemukiman diluar rencana yang kemudian berdampak pada terbentuknya pemukiman-pemukiman kumuh di perkotaan.

**Rini Novianti Yusuf, 2015**

*PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Banyaknya penduduk miskin perkotaan tidak hanya disebabkan oleh hal yang sudah dipaparkan di atas, melainkan ada faktor lain yang menyebabkan kemiskinan di wilayah perkotaan, faktor tersebut salah satunya adalah pendidikan. Rendahnya pendidikan yang diperoleh masyarakat Indonesia, pendidikan yang tidak merata sampai ke pelosok daerah. Rendahnya pendidikan tidak hanya pada konteks pendidikan formal, adapula lemahnya pendidikan pada konteks nonformal yaitu pendidikan keterampilan, sikap, modal usaha, *networking*, dll. Dalam upaya pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja, dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup sendiri.

Proses pendidikan yang dimaksud pada upaya pemberdayaan dapat berupa pendidikan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan kompetensi seseorang. Hasil penelitian Anwas (2013, hlm 56) menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kompetensi. Yang menarik pada temuan Anwas bahwa dalam kegiatan pelatihan yang terpenting bukan lamanya waktu pelatihan, akan tetapi frekuensi kegiatan pelatihan. Dengan banyaknya frekuensi pelatihan, berarti individu tidak hanya lebih sering mendapatkan ilmu pengetahuan baru akan tetapi mendapatkan aspek lain yang berguna untuk meningkatkan kemampuannya.

Senada dengan pendapat di atas, Kamil (2010, hlm 151) mengemukakan bahwa:

Pelatihan sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran, artinya individu (anggota masyarakat) harus mempelajari sesuatu (materi) guna meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan tingkah laku dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dalam menopang ekonominya (pendapatan).

Pelatihan yang dimaksud salah satunya dapat berupa pelatihan kecakapan hidup. Menurut Kamil (2010, hlm 130) “kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia”. Oleh karena itu, kecakapan

hidup adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada masyarakat tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Saat ini, ada upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh salah satu lembaga koperasi, lembaga koperasi tersebut adalah Misykat (*Microfinance Syariah berbasis Masyarakat*). Misykat membantu masyarakat miskin pada segi ekonomi dengan berbasis keagamaan. Koperasi Misykat memberi bantuan dengan pinjaman uang tanpa ada bunga. Salah satu sasaran lembaga ini yaitu di daerah Cicadas tepatnya di Rw 01 kelurahan Cikutra kecamatan Cibeunying Kidul kota Bandung. Pada proses Misykat di Rw 01 yang sudah berjalan dari tahun 2006, tidak hanya kegiatan peminjaman uang tetapi ada pula kegiatan program pendampingan dengan memberikan pelatihan kecakapan hidup.

Alasan yang mendasari salah satu sasaran lembaga Misykat di wilayah Rw 01 kelurahan Cikutra kecamatan Cibeunying Kidul kota Bandung yaitu Kecamatan Cibeunying Kidul merupakan daerah yang sebagian besar didominasi oleh penduduk pendatang dengan pemukiman padat dan sebagian lagi merupakan kawasan perdagangan dan pendidikan. Lokasinya yang dekat dengan pusat bisnis dan pemerintahan kota membuat kecamatan ini menjadi tempat ideal bagi penduduk untuk bermukim. Cibeunying Kidul sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kota Bandung memiliki luas wilayah sekitar 4,62 KM<sup>2</sup>.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Cibeunying Kidul khususnya Kelurahan Cikutra adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah dengan pendapatan rata-rata Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- per bulan. Apabila melihat garis kemiskinan Jawa Barat menurut BPS yaitu Rp.288.742,- maka masyarakat Cikutra termasuk ke dalam masyarakat miskin dengan pendapatan di bawah nilai rupiah garis kemiskinan. Kebanyakan penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang dan buruh. Perumahan di wilayah Cikutra yang tidak layak huni, dengan luas rumah yang sempit serta bangunan tidak dari tembok. Selanjutnya pemukiman yang tidak memadai atau kumuh, menjadi indikator dari masyarakat

Rini Novianti Yusuf, 2015

PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Cikutra termasuk masyarakat miskin perkotaan. Pendidikan yang dicapai masyarakat pun sebagian tidak mampu mencapai target minimal standar pendidikan, karena orientasi masyarakat yang hanya mementingkan kebutuhan ekonomi dan hal tersebut berpengaruh terhadap kesadaran yang rendah untuk menyekolahkan anak. sehingga banyak anak usia sekolah yang dipekerjakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Kelurahan Cikutra tahun 2008 sebanyak 24.167 jiwa yang terdiri 12.368 laki- laki dan 11.799 jiwa perempuan dan usia produktif wanita dari usia 15 sampai 50 tahun sebanyak 6.819 jiwa. Wilayah kelurahan Cikutra sering disebut dengan sebutan Pa-ku-Mis ( Padat, Kumuh, dan Miskin ), hal ini terbukti dengan jumlah penduduk satu Rw di Rw 01 mencapai 904 orang. Penduduk sebanyak 904 orang tersebar pada 5 Rt dalam satu Rw. Rw 01 Kelurahan Cikutra terletak di daerah perkotaan, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan sosial yang terjadi. Mata Pencaharian warga Rw 01 Kelurahan Cikutra yaitu sebageian besar adalah pedagang kaki lima (PKL) dan tingkat pendidikan sebagian besar SMP/SMA. Latar belakang warga Rw 01 sebagai pedagang kaki lima (PKL) tidak lain salah satu faktor penyebabnya yaitu rendahnya tingkat pendidikan, sehingga sulit untuk mencari/mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Hal ini mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan perubahan terutama dalam hal peningkatan ekonomi, bekerjasama dengan pemerintahan setempat baik tingkat Rw, Kelurahan dan Kecamatan serta berbagai lembaga yang ada di wilayah Rw 01. Program penanggulangan kemiskinan yang dievaluasi meliputi, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri (*Self Employment Program*), dan Proyek Pembangunan Fisik dalam program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya (*Public Work Progam*).

Program-program penanggulan tersebut, dirasa masih belum dapat memberdayakan masyarakatnya pada segi ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh kurang tepatnya mengidentifikasi kebutuhan dalam arti menelaah berbagai hal yang berkaitan dengan kemiskinan. Tanpa ada data yang akurat yang berkaitan

Rini Novianti Yusuf, 2015

PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan kemiskinan itu maka akan sulit untuk mengusahakan pengentasan kemiskinan secara baik. Melihat kondisi tersebut menggugah kepedulian dari sekelompok masyarakat untuk membantu permasalahan tersebut.

Sekelompok masyarakat tersebut tergabung dalam organisasi lembaga masyarakat, lembaga masyarakat yang berorientasi pada bidang ekonomi. Salah satunya adalah Lembaga koperasi Misykat (*Microfinance* Syariah berbasis Masyarakat) dengan memberi bantuan pinjaman uang khususnya untuk modal usaha. Karena masyarakat Rw 01 dominan mata pencahariannya adalah Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang dekat dengan perkotaan, maka salah satu alasan sasaran dari Misykat yaitu karena ada permasalahan di wilayah ini.

Dalam upaya membuka usaha sendiri, tidak sedikit masyarakat yang terbentur dengan masalah permodalan. Usaha yang dijalankan berpendapatan tidak menentu, pendapatan tersebut terkadang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan membuat modal awal usaha ikut terpakai. Hal tersebut, menjadikan masyarakat harus mencari modal usaha baru. Koperasi keliling atau rentenir sering dijadikan solusi dalam permasalahan ekonomi masyarakat, tanpa berpikir panjang kembali akibat dari meminjam uang kepada rentenir atau koperasi keliling membuat masyarakat jadi terjerat hutang dengan bunga yang besar. Dengan adanya Misykat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat.

Misykat berawal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) ini berbeda dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya, karena LSM ini menggunakan pola syariah dan berasaskan Islam. LSM Islam yang mengelola dana-dana infaq, shadaqoh, dan wakaf. Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid ( DPU-DT ) yang mengelola dana infaq,shodaqoh untuk kemudian disalurkan kepada para *mustahiq* dalam bentuk pinjaman dana produktif, lembaga yang mengelola pinjaman dana produktif tersebut bernama Koperasi Misykat ( *Microfinance* Syarih Berbasis Masyarakat ).

Misykat merupakan akronim dari *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat, adalah sebuah lembaga yang lahir dari Dana Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT). Misykat merupakan lembaga koperasi yang *concern* terhadap

Rini Novianti Yusuf, 2015

PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISKAT (*MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT*) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, karena secara konsisten lembaga ini memberikan bantuan dana bergulir kepada mereka yang mau berusaha untuk memperbaiki nasibnya. Lembaga ini lahir atas keprihatinan terhadap masyarakat mustadh'afin (yang dilemahkan) oleh struktural maupun yang disebabkan oleh beberapa faktor baik itu eksternal maupun internal. Tujuan dari lembaga ini yaitu (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,(2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Fokus pelayanan lembaga Misykat lebih menitikberatkan pada program pemberdayaan masyarakat yang kemudian direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan peningkatan usaha menuju kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Pemberdayaan pada lembaga ini menjadi program utama melalui pendayagunaan dana-dana keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dengan orientasi produktivitas, pengembangan usaha kecil, yang melibatkan kelompok-kelompok miskin. Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, lembaga ini menggunakan pola syariah atau berjalannya program mengacu pada asas-asas keislaman.

Adanya lembaga koperasi Misykat ini sedikitnya telah membantu masyarakat Rw 01 kelurahan Cikutra kecamatan Cibeunying Kidul dalam permasalahan ekonomi. Selain membantu masyarakat, upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh Misykat secara tidak langsung juga membantu program pemerintah. Arti dari membantu masyarakat miskin disini adalah lembaga Misykat tidak hanya sekedar memberi dana pinjaman, tetapi memberikan pendidikan dan keterampilan kepada masyarakat, sehingga capaiannya adalah masyarakat tidak hanya diuntungkan melalui dana pinjaman, tetapi masyarakat juga diuntungkan melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan. Pendidikan berupa pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan kecakapan hidup berorientasi pada pengembangan pengetahuan, penanaman nilai & moral, dan pengembangan keterampilan.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh lembaga Misykat ke masyarakat Rw 01 yaitu melalui program pendampingan. Pendampingan

Rini Novianti Yusuf, 2015

*PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diperlukan sebagai agen pemberdayaan yang tugasnya bukan menggurui, tetapi lebih tepatnya sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator dan pembimbing masyarakat di lapangan. Pengertian pendampingan menurut Kamil ( 2010, hlm 169 ) adalah :

Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendamping maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama-sama, interaktif yaitu antara pendamping dan yang didampingi harus sama-sama aktif, komunikatif yaitu apa yang disampaikan pendamping atau yang didampingi dapat dipahami bersama (persamaan pemahaman).

Pendampingan bertujuan membantu individu masyarakat dan atau kelompok dalam pengembangan usahanya (mengoptimalkan potensinya) agar mampu mandiri antara lain memiliki sumber usaha yang tetap dan layak, sehingga dapat menjadi pengusaha yang berhasil dalam lingkungannya. Merujuk pada pengertian di atas, pendampingan yang dilakukan oleh lembaga Misykat yaitu Pendampingan diisi dengan pelatihan kecakapan hidup dilaksanakan setiap seminggu sekali atau sering disebut dengan sebutan “pertemuan pekanan”. Orientasi sasaran dalam pelaksanaan lembaga Misykat adalah perempuan, kelompok kaum perempuan tersebut dinamakan majelis. Majelis Khoerunnisa adalah nama sebutan untuk masyarakat yang menjadi anggota Misykat di Rw 01 kelurahan Cikutra dengan jumlah anggota kurang lebih 15 orang. Pendampingan merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan lembaga Misykat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Hasil identifikasi di lapangan dan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “ Program pendampingan anggota koperasi Lembaga Misykat (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat) dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan”.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi tentang pendampingan program Misykat di wilayah Rw 01 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul diantaranya adalah :

**Rini Novianti Yusuf, 2015**

*PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISKIN (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Wilayah Rw 01 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul berada di daerah perkotaan, yang karakteristik lokasinya dekat dengan pusat bisnis dan pemerintahan kota membuat wilayah ini menjadi tempat ideal bagi penduduk untuk bermukim.
2. Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Rw 01 kelurahan Cikutra rata-rata SMP dan SMA, sehingga membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
3. Mayoritas mata pencaharian masyarakat yaitu sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL ), hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah serta banyak pendatang dari daerah ke kota dengan tujuan merubah perekonomian keluarga, tetapi karena faktor pendidikan mereka menjadi sulit mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menjadi PKL.
4. Banyak warga masyarakat yang meminjam uang ke lembaga keuangan atau koperasi pinjaman dengan bunga yang cukup besar, sehingga warga masyarakat terjerat rentenir/lintah darat.
5. Adanya keinginan warga masyarakat untuk melakukan perubahan taraf hidup menjadi lebih baik, dengan menjadi anggota lembaga keuangan koperasi Misykat.
6. Dana Pinjaman yang digulirkan oleh lembaga Misykat kepada masyarakat miskin berasal dari Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT)
7. Adanya pola pendampingan yang dilakukan oleh Misykat, sehingga menjadi pembeda dengan koperasi pinjaman lainnya.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu lembaga koperasi Syariah Misykat Berdasarkan pemaparan kondisi diatas, penulis merumuskan masalah yaitu *bagaimanakah pendampingan program koperasi Misykat dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan ?* Berdasarkan permasalahan tersebut, maka secara khusus permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

**Rini Novianti Yusuf, 2015**

**PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana hasil (*output*) yang didapat oleh anggota koperasi setelah mengikuti pelatihan kecakapan hidup (pra pendampingan) yang diselenggarakan oleh Misykat ?
2. Bagaimana pendampingan program yang dikelola oleh lembaga koperasi Misykat ?
3. Bagaimana capaian perubahan masyarakat (anggota koperasi) setelah mengikuti pendampingan program ?
4. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung dari program pendampingan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran mengenai *output/* hasil yang didapat oleh anggota setelah mengikuti pelatihan kecakapan hidup (pra pendampingan) yang diselenggarakan oleh Misykat.
2. Untuk mengetahui gambaran mengenai program pendampingan yang dikelola oleh lembaga koperasi Misykat
3. Untuk mengetahui gambaran mengenai capaian perubahan masyarakat (anggota Misykat) setelah mengikuti pendampingan program
4. Untuk mengetahui gambaran mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung dari program pendampingan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis dan praktis khususnya untuk peneliti adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis  
Manfaat bagi peneliti yaitu memperkaya pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan/pembinaan dalam konteks ekonomi masyarakat.
2. Secara Praktis  
Menjadi bahan informasi dan keilmuan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan/pembinaan, serta menjadi bahan informasi dan keilmuan mengenai koperasi syariah di masyarakat.

Rini Novianti Yusuf, 2015

PROGRAM PENDAMPINGAN ANGGOTA KOPERASI MISYKAT (MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **F. Struktur Organisasi Skripsi**

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang mendukung terhadap penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian termasuk komponen-komponen, dan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pengolahan atau analisis data untuk memperoleh temuan berkaitan dengan masalah penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran penulis terhadap hasil penelitian.